

**STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN DALAM MITIGASI
MIGRASI NON PROSEDURAL DI KABUPATEN FLORES TIMUR****STRATEGY FOR STRENGTHENING IMMIGRATION SERVICES IN MITIGATION
OF NON-PROCEDURAL MIGRATION IN EAST FLORES REGENCY**

<https://10.0.205.137/jaid.v6i1.879>

Submitted: 05-04-2026 Reviewed: 23-04-2025 Published: 15-05-2026

Rendy Arizal Radja Djingi

rendyradja07@gmail.com

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Abstract. *Non-procedural migration remains a significant issue in East Flores Regency, driven by economic pressures and limited community knowledge regarding official immigration procedures. This study aims to analyze the condition of non-procedural migration based on push-pull factors and to formulate strategies for strengthening immigration services as a mitigation effort. A qualitative descriptive approach was employed using interviews, observations, and document analysis, with data analyzed through Everett S. Lee's push-pull theory and SWOT analysis. Findings indicate that limited employment opportunities, restricted access to services, and low understanding of official procedures contribute to non-procedural migration. Strengthening strategies require adaptive, preventive, and integrated immigration service approaches.*

Keywords: *Non-procedural migration; Immigration services; Push-pull factors.*

Abstrak. Migrasi non prosedural masih menjadi permasalahan signifikan di Kabupaten Flores Timur yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait prosedur keimigrasian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi migrasi non prosedural berdasarkan faktor pendorong dan penarik serta merumuskan strategi penguatan pelayanan keimigrasian sebagai upaya mitigasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan analisis menggunakan teori push-pull dan SWOT. Hasil menunjukkan bahwa keterbatasan lapangan kerja, kendala akses layanan, dan rendahnya pemahaman prosedur resmi mendorong migrasi non prosedural, sehingga diperlukan penguatan pelayanan yang adaptif, preventif, dan terintegrasi

Kata kunci: Migrasi non prosedural; Pelayanan keimigrasian; Faktor push-pull.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi transportasi serta informasi pada era modern saat ini telah menjadikan mobilitas manusia antarnegara semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Akses terhadap peluang kerja, pendidikan, maupun kehidupan yang lebih baik di luar negeri kini dapat diperoleh melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal, sehingga mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan migrasi internasional. Peningkatan arus migrasi tersebut juga tidak terlepas dari semakin tingginya ketergantungan sosial ekonomi antarnegara serta



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

adanya tekanan kondisi di negara asal, seperti keterbatasan kesempatan kerja dan kesejahteraan hidup (Sugiyono, 2022). Namun, kemudahan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai terkait prosedur keimigrasian yang sah, sehingga memunculkan fenomena migrasi non prosedural yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerentanan terhadap eksploitasi, perdagangan orang, hingga pelanggaran hukum keimigrasian (Mustika Intan et al., 2025). Kondisi ini menjadi tantangan strategis bagi penyelenggara layanan keimigrasian, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah kantong pekerja migran seperti Flores Timur, sehingga diperlukan penguatan pelayanan keimigrasian yang adaptif, preventif, dan berbasis mitigasi risiko guna menekan praktik migrasi non prosedural.

Secara geografis, Kabupaten Flores Timur memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang berada pada jalur strategis perlintasan antarwilayah serta relatif dekat dengan akses transportasi laut dan udara yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara tujuan migrasi tenaga kerja. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas ke luar negeri, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi yang sulit diawasi secara optimal. Dalam konteks migrasi internasional, negara seperti Malaysia menjadi tujuan yang cukup diminati oleh masyarakat Flores Timur karena menawarkan tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan peluang kerja di daerah asal. Selain itu, tingginya permintaan tenaga kerja di berbagai negara tujuan juga turut memperkuat arus migrasi, dimana Malaysia tercatat sebagai salah satu destinasi utama pekerja migran Indonesia dengan jumlah penempatan yang relatif dominan dibandingkan negara lainnya (Salsabilla, 2024). Perbedaan kesejahteraan ekonomi tersebut menjadi faktor penarik yang kuat, sementara keterbatasan lapangan kerja lokal turut mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penghidupan di luar negeri. Situasi geografis yang mendukung akses mobilitas ini, apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pelayanan keimigrasian yang kuat, berpotensi meningkatkan kerentanan terjadinya migrasi non prosedural, sehingga diperlukan strategi penguatan pelayanan keimigrasian yang adaptif, preventif, dan terintegrasi dalam rangka mitigasi risiko migrasi ilegal di Kabupaten Flores Timur.

Pada sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Flores Timur turut menjadi faktor pendorong meningkatnya minat bekerja ke luar negeri. Tingginya jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran yang masih signifikan, terbatasnya lapangan pekerjaan formal, serta rendahnya rata-rata upah yang tersedia di daerah menjadi tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih layak di negara lain (Jehadut, 2025). Perbedaan tingkat kesejahteraan yang cukup mencolok antara peluang kerja di dalam negeri dengan negara tujuan seperti Malaysia semakin memperkuat keputusan masyarakat untuk bermigrasi, baik melalui jalur resmi maupun non prosedural. Selain faktor ekonomi, kendala akses terhadap pelayanan dokumen perjalanan juga menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat Flores Timur. Jarak tempuh yang relatif jauh menuju lokasi pelayanan keimigrasian di Kabupaten Sikka patnya di pMaumere, yang memerlukan perjalanan darat dan laut sekitar empat hingga lima jam, ditambah dengan kebutuhan waktu beberapa hari kerja untuk proses penerbitan paspor serta persyaratan dokumen tambahan, seringkali menimbulkan persepsi ketidakefisienan dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Kondisi tersebut pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat memilih jalur migrasi non prosedural, sehingga mempertegas pentingnya strategi penguatan pelayanan keimigrasian yang lebih mudah diakses, responsif, dan

berorientasi pada mitigasi risiko migrasi ilegal di Flores Timur.

Dalam upaya mengatasi berbagai faktor pendorong terjadinya migrasi non prosedural di Kabupaten Flores Timur, penguatan pelayanan keimigrasian menjadi salah satu kunci strategis yang memiliki peran penting dalam fungsi mitigasi dan pencegahan. Pelayanan keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif penerbitan dokumen perjalanan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan awal, edukasi masyarakat, serta penyaringan terhadap potensi migrasi yang berisiko. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di layanan keimigrasian menjadi hambatan utama dalam menjangkau masyarakat, sehingga inovasi layanan yang ada, meskipun memberikan dampak positif, belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan aksesibilitas layanan keimigrasian di wilayah terpencil (Ardiansyah et al., 2025). Keterbatasan akses geografis masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang saat ini terpusat di Maumere menunjukkan adanya kesenjangan jangkauan pelayanan yang berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen perjalanan secara resmi. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas layanan melalui penguatan jaringan pelayanan, seperti pengembangan unit kerja keimigrasian atau pos layanan di wilayah Flores Timur, dipandang sebagai salah satu langkah strategis yang berpotensi mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan kemudahan prosedur, serta memperkuat fungsi preventif dalam mitigasi migrasi non prosedural secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Migrasi non prosedural tidak hanya menimbulkan kerentanan bagi individu yang terlibat, tetapi juga berdampak luas terhadap kepentingan negara. Praktik migrasi ilegal berpotensi memicu berbagai persoalan seperti meningkatnya kasus perdagangan orang, pelanggaran hukum lintas negara, eksploitasi tenaga kerja, serta hilangnya perlindungan negara terhadap warga negaranya di luar negeri (Sampetoding, 2025). Selain itu, migrasi non prosedural juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial, keamanan nasional, serta citra Indonesia dalam tata kelola migrasi internasional. Dalam konteks tersebut, peran keimigrasian menjadi sangat strategis sebagai garda terdepan dalam sistem pengawasan mobilitas penduduk lintas negara. Fungsi keimigrasian tidak hanya terbatas pada pelayanan administrasi dokumen perjalanan, tetapi juga mencakup aspek pengendalian, pencegahan, serta perlindungan warga negara melalui mekanisme deteksi dini terhadap potensi migrasi berisiko. Oleh karena itu, penguatan pelayanan keimigrasian yang adaptif dan berbasis mitigasi menjadi elemen penting dalam mendukung upaya negara menekan praktik migrasi non prosedural, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi seperti Kabupaten Flores Timur.

Meskipun berbagai kajian mengenai migrasi non prosedural telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek penyebab dan dampak migrasi dari perspektif sosial ekonomi maupun perlindungan tenaga kerja migran. Kajian yang secara khusus mengkaji penguatan pelayanan keimigrasian sebagai instrumen mitigasi migrasi non prosedural, terutama pada wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses pelayanan seperti Kabupaten Flores Timur, masih relatif terbatas. Padahal, pelayanan keimigrasian memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam sistem pengendalian mobilitas lintas negara melalui fungsi pelayanan, pengawasan, dan perlindungan warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan pelayanan keimigrasian dalam mitigasi migrasi non prosedural di Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT serta kerangka teori *push-pull* yang dikemukakan oleh Everett S. Lee, yang menekankan adanya faktor pendorong (*push factors*) dan faktor

penarik (*pull factors*) dalam keputusan seseorang untuk melakukan migrasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi penguatan pelayanan keimigrasian dalam mitigasi migrasi non prosedural di wilayah Flores Timur dan Lembata. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi pelayanan keimigrasian, faktor-faktor yang mendorong dan menarik migrasi masyarakat, serta dinamika kelembagaan dan kebijakan yang mempengaruhi terjadinya migrasi non prosedural (Siagian et al., 2025). Metode studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada konteks wilayah spesifik yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas sebagai daerah kantong pekerja migran.

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Flores Timur sebagai locus utama dalam merumuskan strategi penguatan pelayanan keimigrasian guna mitigasi migrasi non prosedural, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, tingkat mobilitas masyarakat, serta kerentanan terhadap praktik migrasi non prosedural di wilayah tersebut. Dalam perumusan alternatif kebijakan, penelitian ini mengkaji dua skenario penguatan pelayanan, yaitu pembentukan unit kerja baru berupa Kantor Imigrasi di Larantuka sebagai opsi penguatan kelembagaan jangka panjang, yang secara potensial dapat mencakup wilayah kerja Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata mengingat kedekatan geografis dan pola mobilitas antarwilayah, serta pembentukan atau penguatan pos pelayanan keimigrasian sebagai strategi jangka pendek yang difokuskan pada Kabupaten Flores Timur sebagai wilayah implementasi utama. Dengan demikian, Kabupaten Flores Timur tetap menjadi pusat analisis penelitian, sementara Kabupaten Lembata dipertimbangkan secara kondisional dalam konteks evaluasi kelayakan pembentukan kantor imigrasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi petugas imigrasi, pemerintah daerah, serta masyarakat yang memiliki pengalaman terkait migrasi ke luar negeri. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, antara lain data statistik kependudukan, data pekerja migran Indonesia, laporan instansi pemerintah, regulasi terkait keimigrasian, serta literatur ilmiah yang relevan dengan pelayanan keimigrasian dan migrasi non prosedural. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang. Selanjutnya, untuk merumuskan strategi penguatan pelayanan keimigrasian, penelitian ini menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) guna mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dalam mitigasi migrasi non procedural (Saraswati et al., 2022). Analisis SWOT dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka teori *push–pull* yang dikemukakan oleh Everett S. Lee untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menarik masyarakat melakukan migrasi ke luar negeri (Lauren et al., 2025). Faktor pendorong dianalisis dari kondisi sosial ekonomi daerah asal, seperti kemiskinan, pengangguran,

keterbatasan lapangan kerja, serta akses pelayanan publik yang terbatas. Sementara itu, faktor penarik dianalisis dari peluang kerja, perbedaan tingkat upah, permintaan tenaga kerja di negara tujuan, serta kemudahan mobilitas. Integrasi analisis SWOT dan teori *push–pull* diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi penguatan pelayanan keimigrasian dalam mitigasi migrasi non prosedural di wilayah penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1 *Push- Pull Factors*

Migrasi non prosedural di Kabupaten Flores Timur tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial ekonomi serta faktor struktural yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Berdasarkan kerangka teori *push–pull* yang dikemukakan oleh Everett S. Lee, keputusan migrasi dipengaruhi oleh faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan (Urbański, 2022). Oleh karena itu, untuk memahami kecenderungan migrasi non prosedural di Flores Timur, diperlukan analisis terhadap kedua faktor tersebut secara komprehensif.

3.1.1 Faktor Pendorong (*Push Factors*)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Kabupaten Flores Timur dalam periode 2021–2025 yang dapat dilihat pada tabel dibawah berada pada kisaran 10–11 persen, dengan kecenderungan peningkatan pada 2022–2023 sebelum mengalami penurunan pada 2024–2025.

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)
2021	11,14
2022	11,75
2023	11,77
2024	11,25
2025	10,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur 2025, diolah oleh peneliti 2026

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masih menjadi permasalahan struktural yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, yang dapat dilihat pada tabel dibawah menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif fluktuatif pada kisaran 3–4 persen mencerminkan keterbatasan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal.

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)
-------	--------------------------------

2021	11,14
2022	11,75
2023	11,77
2024	11,25
2025	10,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur 2024, diolah oleh peneliti 2026

Meskipun rata-rata upah bersih mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir, nilainya masih relatif rendah dan belum mampu memberikan daya saing ekonomi yang signifikan dibandingkan peluang kerja di luar negeri.

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap layanan keimigrasian turut memperkuat faktor pendorong migrasi non prosedural. Masyarakat Flores Timur harus menempuh perjalanan darat sekitar 4–5 jam menuju Kantor Imigrasi Maumere, sementara

Wilayah	Upah Minimum/Bersih Bulanan
Flores Timur	Rp1.933.511
Malaysia	RM1.700 atau Rp7.344.840

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur (2024); Government of Malaysia (2024).

masyarakat di wilayah kepulauan Adonara harus menyeberang laut dahulu ke Larantuka lalu melakukan perjalanan darat dengan jarak kurang lebih 143 kilometer. Proses penerbitan paspor yang memerlukan waktu serta biaya yang relatif tinggi bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah turut menjadi hambatan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan keterbatasan akses layanan secara simultan berkontribusi dalam mendorong praktik migrasi non prosedural.

3.1.2 Faktor Penarik (*Pull Factors*)

Migrasi non prosedural masyarakat Flores Timur juga dipengaruhi oleh faktor penarik yang berasal dari perbedaan tingkat kesejahteraan antara daerah asal dan negara tujuan, khususnya Malaysia sebagai destinasi dominan. Berdasarkan *Minimum Wages Order 2024* yang diterbitkan dalam *Federal Government Gazette*, upah minimum bulanan di Malaysia ditetapkan sebesar RM1.700 (Minister of Human Resources Malaysia, 2024). Jika dibandingkan dengan rata-rata upah bersih di Kabupaten Flores Timur yang berada pada kisaran di bawah Rp2.000.000 per bulan, terdapat kesenjangan pendapatan yang signifikan, yang bisa dilihat pada tabel perbandingan berikut.

Perbedaan ini membentuk persepsi bahwa bekerja di Malaysia memberikan peluang peningkatan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan bekerja di sektor lokal.

Selain faktor ekonomi, keberadaan jaringan sosial pekerja migran yang telah lebih dahulu bekerja di Malaysia turut memperkuat daya tarik tersebut. Laporan media nasional menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 pekerja migran asal Kabupaten Flores Timur dan Lembata yang bekerja di luar negeri berstatus non prosedural (Kompas, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa migrasi ke Malaysia telah berkembang menjadi pola sosial yang didukung oleh relasi dan jaringan informal, yang dalam beberapa kasus memfasilitasi keberangkatan tanpa melalui prosedur resmi. Dengan demikian, faktor penarik migrasi tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan, tetapi juga oleh persepsi peluang ekonomi dan dukungan jaringan sosial yang telah terbentuk.

3.1.3. Sintesis *Push–Pull* dan Implikasi Terhadap Layanan Keimigrasian

Hasil analisis faktor pendorong dan penarik menunjukkan bahwa migrasi masyarakat Flores Timur merupakan konsekuensi dari interaksi antara tekanan struktural di daerah asal dan daya tarik ekonomi di negara tujuan. Tekanan ekonomi yang tercermin dari tingkat kemiskinan, pengangguran, serta keterbatasan upah lokal diperkuat oleh kesenjangan pendapatan dengan Malaysia sebagai destinasi dominan. Pada saat yang sama, jaringan sosial pekerja migran turut memfasilitasi arus migrasi, termasuk melalui jalur yang tidak selalu sesuai dengan prosedur resmi.

Namun demikian, data pekerja migran Indonesia (PMI) prosedural menunjukkan bahwa jumlah keberangkatan melalui jalur resmi relatif terbatas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah PMI asal Flores Timur pada tahun 2024 tercatat sebanyak 19 orang (BPS NTT, 2025). Sementara itu, data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur periode Januari–Desember 2025 menunjukkan angka yang masih relatif rendah (BP3MI NTT, 2025). Sebaliknya, laporan media nasional menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 pekerja migran asal Flores Timur dan Lembata bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi (Kompas, 2023).

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan antara potensi migrasi dan optimalisasi mekanisme keberangkatan yang sah. Faktor ekonomi dan daya tarik negara tujuan yang kuat belum sepenuhnya diimbangi dengan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan keimigrasian, sehingga diperlukan evaluasi terhadap bentuk penguatan pelayanan keimigrasian yang paling sesuai dengan kebutuhan wilayah, termasuk kemungkinan pembentukan unit layanan baru atau optimalisasi mekanisme pelayanan yang telah ada.

3.2. Analisis SWOT

Untuk merumuskan strategi penguatan pelayanan keimigrasian dalam mitigasi migrasi non prosedural di Kabupaten Flores Timur, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT dipilih sebagai kerangka analitis karena mampu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik serta membantu dalam perumusan alternatif strategi kebijakan yang komprehensif dan realistis.

Dalam konteks penelitian ini, faktor internal mencakup kapasitas kelembagaan, kinerja pelayanan, serta keterbatasan struktural yang dimiliki oleh penyelenggara layanan keimigrasian. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat, dinamika migrasi internasional, serta lingkungan kebijakan yang memengaruhi praktik migrasi di wilayah Flores Timur. Dengan mengintegrasikan temuan pada analisis faktor pendorong dan penarik sebelumnya, pendekatan SWOT digunakan untuk mengevaluasi alternatif penguatan layanan melalui strategi bertahap, baik dalam bentuk pembentukan pos pelayanan keimigrasian maupun kemungkinan pembentukan kantor imigrasi di Larantuka berdasarkan indikator kebutuhan dan kelayakan administratif.

3.2.1 *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan utama dalam penguatan pelayanan keimigrasian terletak pada aspek kelembagaan dan kapasitas administratif yang telah berjalan secara relatif stabil. Secara normatif, sistem keimigrasian Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang jelas, termasuk mekanisme selektif dalam penerbitan paspor sebagai instrumen pengawasan terhadap potensi migrasi non prosedural. Mekanisme ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi petugas imigrasi dalam melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan dokumen perjalanan. Selain itu, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere dalam periode 2022–2025 menunjukkan stabilitas pada kisaran Rp1,5–1,7 miliar per tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut :

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	
Tahun	Total PNBP
2022	Rp1.108.650.000
2023	Rp1.686.300.000
2024	Rp1.539.052.305
2025	Rp1.702.114.062
Sumber : Data keuangan kantor imigrasi maumere 2026 (diolah oleh peneliti, 2026)	

Kondisi ini mencerminkan adanya aktivitas pelayanan yang konsisten serta kapasitas operasional yang berjalan efektif. Stabilitas tersebut juga mengindikasikan bahwa secara administratif dan fiskal, pelayanan keimigrasian di wilayah kerja Maumere memiliki produktivitas yang memadai untuk mendukung penguatan layanan di wilayah yang memiliki kebutuhan signifikan

seperti Flores Timur.

Ketersediaan sistem pelayanan berbasis digital, seperti penggunaan aplikasi M-Paspor, turut menjadi kekuatan internal dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi dan transparansi layanan. Sistem ini memungkinkan proses awal permohonan dilakukan secara daring, sehingga berpotensi mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

Di samping itu, tersedianya data administratif permohonan paspor periode 2020–2025 menjadi kekuatan dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Persentase Sumbangi Permohonan Paspor Kabupaten Flores Timur dan Lembata terhadap Total Permohonan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Tahun 2020–2025		
Wilayah	Jumlah Permohonan	Persentase terhadap Total (%)
Kab. Flores Timur	1.089	14,11%
Kab. Lembata	465	6,03%
Total Flotim + Lembata	1.554	20,14%
Total Kanim Maumere	7.716	100%

Sumber: Data Permohonan Paspor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere Tahun 2020–2025 (diolah peneliti, 2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah Flores Timur dan Lembata menyumbang sekitar 20,14% dari total permohonan paspor di Kantor Imigrasi Maumere, yang menunjukkan adanya kebutuhan layanan yang nyata dan terukur. Keberadaan data yang terstruktur ini menjadi modal penting dalam evaluasi dan perencanaan strategi penguatan pelayanan keimigrasian.

3.2.2 Weakness (Kelemahan)

Meskipun secara kelembagaan pelayanan keimigrasian memiliki kapasitas administratif yang relatif stabil, terdapat sejumlah kelemahan internal yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas mitigasi migrasi non prosedural di Kabupaten Flores Timur. Kelemahan utama terletak pada aspek aksesibilitas geografis pelayanan. Masyarakat Flores Timur harus menempuh perjalanan darat sekitar 4–5 jam menuju Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere. Sementara itu, masyarakat yang berasal dari wilayah kepulauan seperti Adonara perlu melakukan perjalanan laut terlebih dahulu menuju Larantuka, sebelum melanjutkan perjalanan darat sejauh kurang lebih 143 kilometer menuju Maumere. Rangkaian perjalanan multimoda tersebut meningkatkan beban waktu, biaya, serta risiko administratif bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen perjalanan secara resmi.

Kondisi geografis tersebut menunjukkan adanya ketimpangan akses pelayanan keimigrasian yang berpotensi menurunkan insentif masyarakat untuk memanfaatkan jalur migrasi prosedural. Apabila hambatan akses ini tidak

diimbangi dengan strategi perluasan jangkauan layanan, maka risiko masyarakat memilih jalur non prosedural sebagai alternatif yang dianggap lebih cepat dan praktis dapat semakin meningkat.

Selain hambatan geografis, struktur pelayanan yang masih terpusat di Maumere menyebabkan jangkauan sosialisasi dan pengawasan belum sepenuhnya optimal di wilayah kantong migran. Rendahnya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) prosedural asal Flores Timur, yang pada tahun 2024 tercatat hanya 19 orang, menunjukkan bahwa jalur keberangkatan resmi belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses layanan maupun rendahnya literasi prosedural masyarakat terkait mekanisme migrasi yang sah.

Di sisi lain, meskipun Flores Timur dan Lembata menyumbang sekitar 20,14% dari total permohonan paspor periode 2020–2025, proporsi tersebut belum cukup dominan untuk secara langsung membenarkan pembentukan kantor imigrasi baru tanpa kajian kelayakan lebih lanjut. Dengan demikian, kelemahan internal pelayanan saat ini bukan terletak pada kapasitas administratif, melainkan pada distribusi akses layanan yang belum merata secara geografis.

3.2.3 *Opportunity* (Peluang)

Di tengah berbagai tantangan akses dan tingginya praktik migrasi non prosedural, terdapat sejumlah peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan keimigrasian di Kabupaten Flores Timur. Salah satu peluang utama adalah adanya kebutuhan mobilitas masyarakat yang terukur melalui data administratif. Selama periode 2020–2025, Kabupaten Flores Timur dan Lembata mencatat total 1.554 permohonan paspor atau sekitar 20,14% dari total permohonan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere. Data ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki basis pengguna layanan yang nyata dan berkelanjutan.

Stabilitas kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Maumere dalam kisaran Rp1,5–1,7 miliar per tahun pada periode 2022–2025 juga menunjukkan adanya aktivitas pelayanan yang relatif konsisten. Kondisi ini membuka peluang untuk redistribusi atau perluasan jangkauan pelayanan guna menjawab kebutuhan wilayah dengan hambatan geografis yang signifikan. Dengan kata lain, terdapat ruang kebijakan untuk memperkuat layanan tanpa harus mengurangi efektivitas operasional kantor induk.

Selain itu, komitmen pemerintah dalam penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia serta peningkatan tata kelola migrasi yang aman dan teratur menjadi peluang strategis dalam mendukung pendekatan berbasis mitigasi risiko. Dalam konteks ini, penguatan pelayanan keimigrasian di wilayah dengan tingkat migrasi non prosedural yang tinggi dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan perlindungan warga negara.

Perkembangan digitalisasi pelayanan publik juga menjadi peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan dalam penguatan pelayanan keimigrasian. Integrasi sistem daring seperti aplikasi M-Paspor memungkinkan proses pendaftaran dan pengajuan dokumen dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Selain itu, inovasi pelayanan melalui program Eazy Paspor, yaitu

layanan penerbitan paspor secara kolektif di luar kantor imigrasi, membuka ruang perluasan jangkauan pelayanan ke wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Melalui mekanisme ini, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor imigrasi, sehingga hambatan geografis dan beban biaya perjalanan dapat diminimalkan. Dengan demikian, peluang penguatan pelayanan keimigrasian di Flores Timur tidak hanya bertumpu pada aspek fisik kelembagaan, tetapi juga pada optimalisasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi yang tersedia secara adaptif dan fleksibel sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

3.2.4 *Threat* (Ancaman)

Ancaman eksternal utama dalam konteks pelayanan keimigrasian di Kabupaten Flores Timur adalah kuatnya faktor penarik ekonomi dari negara tujuan, khususnya Malaysia. Perbedaan tingkat pendapatan yang signifikan antara upah rata-rata di Flores Timur dan upah minimum di Malaysia menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Kesenjangan tersebut, ketika dipadukan dengan keterbatasan lapangan kerja lokal, berpotensi memperkuat dorongan migrasi meskipun melalui jalur yang tidak prosedural.

Selain faktor ekonomi, keberadaan jaringan sosial migrasi informal juga menjadi ancaman yang nyata. Laporan mengenai lebih dari 1.000 pekerja migran asal Flores Timur dan Lembata yang bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi menunjukkan bahwa praktik migrasi non prosedural telah membentuk pola sosial yang relatif mapan. Jaringan ini dapat memfasilitasi keberangkatan tanpa melalui mekanisme administrasi yang sah, sehingga melemahkan fungsi pengawasan negara.

Tekanan ekonomi lokal yang tercermin dari tingkat kemiskinan dan pengangguran turut memperkuat kerentanan masyarakat terhadap praktik migrasi yang tidak terkelola dengan baik. Apabila hambatan akses terhadap pelayanan keimigrasian tetap tinggi sementara insentif ekonomi luar negeri semakin menarik, maka risiko peningkatan migrasi non prosedural akan semakin besar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan seperti eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, hingga pelanggaran hukum keimigrasian yang merugikan negara dan warga negara itu sendiri.

Dengan demikian, ancaman eksternal yang dihadapi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan struktural. Tanpa intervensi kebijakan yang adaptif dan berbasis perluasan jangkauan layanan, dinamika migrasi non prosedural di Flores Timur berpotensi terus berkembang dan semakin sulit dikendalikan.

3.2.5 Formulasi Strategi Bertahap

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT, penguatan pelayanan keimigrasian dalam mitigasi migrasi non prosedural di Kabupaten Flores Timur perlu dirumuskan melalui pendekatan strategis yang bertahap dan adaptif. Pendekatan ini mempertimbangkan kapasitas kelembagaan yang tersedia, kebutuhan layanan masyarakat, serta indikator beban pelayanan yang terukur.

A. Penguatan Layanan Melalui Pembentukan Pos Pelayanan Keimigrasian

Dalam jangka pendek, strategi yang paling realistis adalah pembentukan pos pelayanan keimigrasian di wilayah Flores Timur, khususnya di Larantuka sebagai pusat aktivitas administratif dan mobilitas masyarakat. Strategi ini memanfaatkan kekuatan kelembagaan yang telah ada serta peluang peningkatan kebutuhan layanan, tanpa memerlukan pembentukan struktur organisasi baru secara penuh.

Pos pelayanan dapat difungsikan untuk melayani permohonan paspor, sosialisasi migrasi prosedural, serta deteksi dini terhadap potensi keberangkatan non prosedural. Integrasi dengan layanan digital seperti M-Paspor dan inovasi layanan Eazy Paspor dapat memperkuat efektivitas model ini. Pendekatan ini secara langsung menjawab kelemahan akses geografis serta berpotensi meningkatkan jumlah migrasi prosedural sebagai upaya mitigasi risiko.

B. Evaluasi dan Pertimbangan Pembentukan Kantor Imigrasi

Dalam jangka menengah hingga panjang, pembentukan Kantor Imigrasi di Larantuka dapat dipertimbangkan secara kondisional berdasarkan evaluasi berkala terhadap indikator kebutuhan dan beban pelayanan. Indikator tersebut meliputi tren peningkatan permohonan paspor, kontribusi wilayah terhadap PNPB, jumlah migrasi prosedural, serta efektivitas pos pelayanan yang telah berjalan.

Dengan kontribusi permohonan paspor dari Flores Timur dan Lembata sebesar sekitar 20,14% dalam periode 2020–2025, pembentukan kantor imigrasi belum secara langsung menunjukkan urgensi absolut. Namun demikian, apabila terjadi peningkatan signifikan dalam beberapa tahun mendatang, maka pembentukan kantor imigrasi dapat menjadi strategi lanjutan yang lebih komprehensif dalam memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, migrasi non prosedural di Kabupaten Flores Timur dipengaruhi oleh interaksi faktor pendorong dan faktor penarik yang signifikan. Tekanan ekonomi lokal yang tercermin dari tingkat kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan rendahnya rata-rata upah mendorong masyarakat untuk mencari alternatif penghidupan di luar negeri. Di sisi lain, perbedaan tingkat pendapatan dengan negara tujuan, khususnya Malaysia, serta keberadaan jaringan sosial migrasi informal memperkuat praktik migrasi non prosedural. Kondisi geografis yang mengharuskan masyarakat menempuh perjalanan multimoda dengan jarak dan waktu yang cukup panjang untuk mengakses layanan keimigrasian turut menjadi faktor yang menurunkan insentif penggunaan jalur migrasi prosedural.

Analisis SWOT menunjukkan bahwa secara kelembagaan pelayanan keimigrasian memiliki kapasitas administratif dan kinerja fiskal yang relatif stabil, namun distribusi akses layanan belum merata secara geografis. Dengan kontribusi permohonan paspor dari Flores Timur dan Lembata sebesar sekitar 20,14% dalam periode 2020–2025, kebutuhan layanan bersifat signifikan tetapi belum dominan. Oleh karena itu, strategi penguatan pelayanan keimigrasian perlu dilakukan secara bertahap melalui pembentukan pos pelayanan

keimigrasian sebagai langkah prioritas jangka pendek, disertai evaluasi berkala terhadap tren kebutuhan layanan untuk mempertimbangkan kemungkinan pembentukan kantor imigrasi di Larantuka pada tahap selanjutnya. Pendekatan bertahap ini diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan sekaligus memitigasi risiko migrasi non prosedural secara lebih efektif dan terukur.

REFERENSI

- Ardiansyah, M. R., Nurkumalawati, I., & Wirdhiningsih, V. (2025). Optimalisasi Pelayanan Keimigrasian di Daerah Terpencil (Studi Kasus Nusa Penida). *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5), 1385–1390. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.1009>
- BPS NTT. (2025, April 21). *Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) 1 ke Luar Negeri Menurut Negara Tujuan, Sektor, dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUwMiMx/banyaknya-pekerja-migran-indonesia--pmi-1-ke-luar-negeri-menurut-negara-tujuan---sektor--dan-jenis-kelamin-di-provinsi-nusa-tenggara-timur--2024.html>
- Frischa Elvira Jehadut, & Surya Dewi Rustariyuni. (2025). Analysis of The Determinants of Poverty in East Nusa Tenggara Province. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 2(1), 397–416. <https://doi.org/10.61132/ijema.v2i1.454>
- Lauren, A., Aryani, S., Bella, A., & Eliza, D. (2025). Makna Tren #Kaburajadulu Dalam Mendorong Keinginan Migrasi Generasi Muda Di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2).
- Minister of Human Resources Malaysia. (2024). *Perintah Gaji Minimum 2024*. <https://lom.agc.gov.my/ilims/upload/portal/akta/outputp/2541500/PUA%20376.pdf>
- Mustika Intan, D., Harmain, I., Fattah Kaloko, I., & korespondensi, A. (2025). Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi. In *The Juris: IX* (Number 1). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Salsabilla, A. T., & Pratomo, D. S. (2024). Determinan Migrasi Internasional Tenaga Kerja. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(2), 384–396. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.2.5>
- Sampetoding, Z., & Burhanuddin, A. (2025). Penyelundupan dan Human Trafficking di Perbatasan Maritim Indonesia di Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 03(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15804126>
- Saraswati, M. K., Ariananto, E., Adi, W., Perhubungan, K. S., Sekretariat, U., Ri, K., Hukum, A., Subbidang, S., Iklim, P., Lingkungan, P., & Sekretariat, H. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.3086/http>
- Seraphinus Sandi Hayon Jehadu. (2023, July 5). *Lebih dari Seribu Pekerja Migran Asal Flores Timur dan Lembata Disebut Belum Punya Dokumen Resmi*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2023/07/05/101454978/lebih-dari-seribu-pekerja-migran-asal-flores-timur-dan-lembata-disebut>
- Siagian, I. M., Pengayoman, P., Rahmawati, I., Jannah, N., & Febrianto, I. A. (2025). *Analisis Transparansi Proses Permohonan Paspor Dalam M-Paspor Dengan*

*Menerapkan Prinsip Good Governance Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi
Transparency Analysis Of The Passport Application Process In M-Passport By
Implementing Good Governance Principles For The Directorate General Of
Immigration* (Vol. 5, Number 2). <https://10.0.205.137/jaid.v5i2.710>

Sugiyono. (2022). Terorisme Dan Migrasi Internasional: Dampak Dan Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(2), 28. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v5i2.10066>

Urbański, M. (2022). Comparing Push and Pull Factors Affecting Migration. *Economies*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/economies10010021>